

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan sebuah perencanaan tidak dapat dilepaskan dari Analisis isu-isu strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah ataupun bagi masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi tersebutlah disusun perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PERANGKAT DAERAH.

Permasalahan pokok pembangunan daerah Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bukittinggi setiap 5 (lima) tahunan. Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kota Bukittinggi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya Tahap II periode 2010-2015, maka dalam bagian ini akan diuraikan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan RPJPD Kota Bukittinggi. Disebutkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi bahwa Visi Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2006- 2025 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka disusun Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan

menyenangkan, serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera;

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

Ukuran keberhasilan pencapaian RPJPD tersebut, dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja lima tahun kedua yang telah diimplementasikan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
Tahap II Tahun 2010 – 2015

No	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET TAHUN 2010-2015		
		TARGET	REALISASI 2014	KET
1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga Konstan (%)	7,17	6,19%	Belum tercapai
2.	PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar)	1.476	4.592	Telah tercapai
3.	Tingkat Inflasi (%)	6,00	9,24	Belum tercapai
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,12	1,82	Belum tercapai
5.	Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta/ \$)	39,6 \$ 3.960	46,83 \$ 3.131	Telah tercapai Belum tercapai
6.	Angka Kematian Bayi (000 kelahiran)	16	4	Telah tercapai
7.	Angka Kurang Gizi (%)	8	0	Telah tercapai
8.	Peringkat HDI/ IPM Nasional	9	11	Belum tercapai
9.	APM usia 19 – 24	40	100	Telah tercapai
10.	Kualitas Pendidikan (berbasis aqidah)	10 nasional		Belum ada data
11.	Pendidikan Internasional (jenjang SLTA)	akreditasi		Perubahan Program Nasional
12.	Rumah Sakit Traumatic Centre	Internasional	Belum ada	Belum tercapai
13.	Pengangguran (%)	9	3,93	Telah tercapai
14.	Kemiskinan (%)	3	4,56	Belum tercapai

Pada RPJPD Kota Bukittinggi yang diturunkan dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015 terdapat 14 indikator pembangunan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian indikator tersebut berdasarkan data tahun 2014 terdapat 6 (enam) indikator yang sudah tercapai dan 6 (enam) indikator yang belum tercapai serta 2 (dua) indikator yang tidak tersedia data dan perubahan program secara nasional. Indikator yang sudah tercapai merupakan kinerja ekonomi terkait nilai PDRB, PDRB perkapita, serta kinerja pendidikan, kesehatan dan tingkat pengangguran. Capaian tersebut menunjukkan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJP untuk periode

2010 – 2015 telah tercapai dengan baik, bahkan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Namun untuk PDRB perkapita ketika dikonversikan ke nilai dolar Amerika dengan kurs Rp. 14.000 per dolar, target ini belum tercapai, karena nilai dolar yang mengalami kenaikan cukup tinggi.

Terdapat beberapa target kinerja yang belum tercapai antara lain:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,19% dari target 7,17% karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional
2. Akibat kenaikan BBM dan pelemahan pertumbuhan sektor riil, sehingga ekonomi Bukittinggi yang didominasi perdagangan dan jasa juga mengalami perlambatan. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi Bukittinggi masih di atas rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat.
3. Tingkat Inflasi yang ditargetkan 6% terealisasi 9,24% akibat penyesuaian harga secara nasional akibat kenaikan BBM yang berimbas terhadap kenaikan harga.
4. Pertumbuhan penduduk ditargetkan 1,12% dan terealisasi 1,82% yang lebih didominasi urban ke Bukittinggi dan masih belum maksimalnya program KB, sementara dari komposisi penduduk juga masih relatif banyak usia pasangan subur.
5. Peringkat IPM yang ditargetkan 9 besar nasional belum bisa dicapai karena perubahan formulasi penghitungan IPM secara nasional yang lebih menguntungkan kota-kota besar dan ibukota provinsi, sehingga menggeser posisi Bukittinggi ke nomor 2 di Sumatera Barat, sementara pada tahun 2013 posisi Bukittinggi sudah pernah mencapai 10 besar nasional.
6. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan 3% terealisasi 4,56% akibat belum maksimalnya program penanggulangan kemiskinan, dan jangkauan intervensi penduduk miskin juga belum menyentuh urban yang belum termuat dalam database kemiskinan Bukittinggi.
7. Rumah Sakit Traumatic di tahun 2015 ditargetkan sudah tersedia di Bukittinggi, namun ini belum dapat diwujudkan secara penuh karena Bukittinggi belum memiliki rumah sakit daerah yang dapat difungsikan untuk hal tersebut, sementara upaya yang telah dilakukan melalui pendekatan kepada rumah sakit yang ada. Pada saat ini rumah sakit yang sudah mengarah kepada hal tersebut adalah Rumah Sakit Sentra Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi yang dimiliki oleh pemerintah.

Disamping target yang telah tercapai tersebut, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tersedia data pendukungnya, yaitu kualitas pendidikan berbasis aqidah 10 besar nasional karena tidak ada penilaian secara nasional, walaupun dalam hal

ini Bukittinggi telah melaksanakannya pada seluruh jenjang pendidikan. Kemudian juga terjadi perubahan kebijakan nasional dengan uji material ketentuan sekolah internasional yang dibatalkan pemerintah pada tahun 2012. Hal ini menyebabkan sekolah internasional yang sudah dijalankan sebelumnya tidak dilaksanakan lagi, dan Bukittinggi mengalihkannya menjadi sekolah unggul pada seluruh jenjang pendidikan.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

4.1.2.1. Aspek Pemerintahan

Proses pembangunan akan berjalan dengan baik tentunya dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini yang masih dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip di atas. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, diantaranya adalah:

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pemerintah Daerah merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, selain elemen urusan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah itu sendiri. Pengaturan terhadap kelembagaan atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi sekarang ini adalah belum maksimalnya Struktur Organisasi Tata Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan SOTK Kota Bukittinggi belum efektif dan efisien karena belum mampu menyentuh seluruh aspek pelayanan masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan kelembagaan pemerintah daerah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal.

Ditetapkannya UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menuntut perubahan regulasi turunannya berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini membawa konsekuensi perubahan struktur kelembagaan, perubahan urusan yang diselenggarakan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Standar Pelayanan Minimal yang hanya difokuskan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Bukittinggi juga akan mengikuti ditetapkan regulasi tersebut.

b. Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana optimal dikarenakan masih terbatasnya kompetensi aparatur dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu manajemen kepegawaian dalam hal penempatan aparatur belum merujuk sepenuhnya kepada kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membawa implikasi perubahan paradigma kepegawaian. Namun Peraturan Pemerintah sebagai regulasi turunannya belum ditetapkan sesuai tuntutan UU tersebut untuk dapat menyempurnakan sistem kepegawaian secara nasional dan di Bukittinggi.

c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana pemerintahan. Kondisi terakhir pusat pemerintahan berupa gedung Balaikota, dan sekretariat daerah berada di Bukit Gulai Bancah Kelurahan Gulai Bancah.

Permasalahan pemenuhan gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi pemerintahan daerah Kota Bukittinggi antara lain; gedung kantor yang masih bergabung dengan kantor lain, menumpang atau memanfaatkan gedung lain yang masih menjadi aset ataupun bukan aset pemerintah kota, luasan gedung yang belum maksimal menampung personil kantor, gedung satu kantor yang terpisah relatif jauh, dan lain sebagainya. Misalnya Kantor DPRD yang memanfaatkan gedung nasional, posisinya yang tidak mendukung ketika terjadi rapat pleno atau paripurna yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, serta keterbatasan ruang sidang, dan alat kelengkapan DPRD. Kondisi ini sangat mendesak untuk dilakukan pembangunan gedung baru yang representatif sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis dan mendukung tugas-tugas DPRD selaku penyelenggara pemerintahan. Beberapa PERANGKAT DAERAH juga masih menggunakan gedung bersama dan

menggunakan gedung lain seperti BKD, PMPKN, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor PP dan KB, Kantor Ketahanan pangan dan beberapa Kantor Lurah

Dukungan sarana dan prasarana lainnya berupa mobiler, peralatan gedung kantor dan peralatan kerja juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas kerja, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik. Sejalan dengan itu, mewujudkan e-government merupakan komitmen yang terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemenuhannya diupayakan dengan peningkatan sarana dan prasarana berupa hardware dan software serta peningkatan sumber daya manusia berupa brain ware.

Mewujudkan Bukittinggi smart city seiring dengan pembangunan kota dan potensi Bukittinggi sebagai kota kunjungan, pariwisata dan jasa juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk layanan publik. Kondisi saat ini Bukittinggi belum memiliki dukungan yang memadai untuk pengembangan jaringan, aplikasi dan sumber daya manusia untuk memenuhinya. Sementara itu kondisi dan potensi Bukittinggi sangat mendukung. Karena itu permasalahan ini akan menjadi prioritas tersendiri untuk diwujudkan lima tahun kedepan.

d. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah akan secara penuh menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah, yang telah dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pelaporan keuangan daerah sudah secara penuh menggunakan accrual base yang menuntut kesiapan personil, sistem dan penyajian laporan sesuai ketentuan tersebut. Pada tahun 2014 dan 2015 Pemerintah Kota Bukittinggi berturut-turut telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Dengan accrual base sebagai wujud implementasi penuh SAP, maka menjadi tantangan besar tidak saja bagi PERANGKAT DAERAH PPKD, tetapi juga seluruh PERANGKAT DAERAH.

Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara bertahap telah mulai diurai dan diselesaikan sampai tahun 2015. Namun permasalahan ini karena bersifat mendasar belum bisa dituntaskan, karena tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi saja, tetapi terkait dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.

4.1.2.2. Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu Negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan antara lain juga melewati pendidikan yang berkualitas. Kinerja pendidikan Kota Bukittinggi pada masa lalu relatif sudah baik, namun tantangan kedepan juga tidak ringan. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk urusan pendidikan pemerintah kabupaten kota tidak lagi berwenang dalam mengelola Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karena harus diserahkan ke pemerintah provinsi, efektif tahun 2017. Selama ini penyelenggaraan pendidikan SLTA termasuk unggulan Bukittinggi yang telah mengukir berbagai prestasi dan memperoleh berbagai penghargaan.

Selain itu, persoalan pendidikan juga akan berdampak terhadap penyelesaian aset dan sumber daya kependidikan yang perlu ditata sedemikian rupa. Beberapa program unggulan Kota Bukittinggi seperti pendidikan berbasis aqidah juga belum maksimal sehingga belum mampu menjadi icon kota sebagaimana yang diharapkan. Terwujudnya masyarakat cerdas yang dibarengi dengan kematangan emosi yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat minangkabau juga belum dapat diukur pencapaiannya karena belum tersedia indikatornya. Permasalahan ini timbul karena belum meratanya akses dan kualitas pendidikan tersebut bagi seluruh masyarakat. Selain itu tingkat kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan saat ini. Berikut yang tidak kalah pentingnya mempengaruhi kualitas pendidikan adalah manajemen pengelolaan lembaga pendidikan yang belum terkelola dengan baik.

4.1.2.3. Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Pemerataan akses pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yaitu Indonesia Sehat. Semenjak tahun 2014 Pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Program BPJS kesehatan. Kehadiran program ini mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang dibiayai pemerintah ataupun secara mandiri. Sampai saat ini lingkup kepesertaan di Bukittinggi relatif sudah baik mencapai 81 % dari target nasional 100% pada tahun 2019.

Terkait itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah persyaratan layanan kesehatan yang berjenjang untuk tingkat rujukan, sehingga dibutuhkan rumah sakit daerah. Semenjak tahun 2013 sudah dialokasikan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit yang hingga akhir tahun 2015 akan tersedia sebesar Rp. 72 Miliar. Pembangunan Rumah sakit ini akan dilaksanakan tahun 2016 konstruksinya, namun Pemerintah Kota Bukittinggi juga membutuhkan bea operasional dan pengembangan berikutnya sehingga menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas.

Kondisi Bukittinggi yang berada di persimpangan dan sebagai kota tujuan wisata juga menyebabkan Bukittinggi rentan tertular penyakit, begitu juga dengan daerah sekitar Bukittinggi. Karena itu Bukittinggi membutuhkan penanganan penyakit yang relatif ekstra dan diakses secara cepat. Unit layanan kesehatan yang ada di Bukittinggi relatif dekat, bahkan mudah diakses tidak hanya oleh masyarakat Bukittinggi, tetapi juga luar kota. Namun ini juga merupakan tantangan tersendiri, sehingga kebijakan Bukittinggi terutama untuk layanan kesehatan juga perlu mempertimbangkan penduduk kota dan bukan penduduk kota, sehingga alokasi anggaran kesehatan dapat dimaksimalkan untuk warga kota. Walaupun pada prinsipnya persoalan bukan hanya masalah daerah dalam batas administratif saja, karena akan mencakup wilayah yang berdekatan.

Permasalahan lain yang harus disikapi belum terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat berdasarkan indikator Indonesia Sehat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta ketersediaan seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu fokus terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat penciptaan lingkungan hidup yang sehat juga menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

4.1.2.4. Bidang Lingkungan Hidup

Proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong gagasan pembangunan yang berbasis lingkungan dan menjadi perhatian hingga internasional. Karena itu pembangunan berwawasan lingkungan menjadi sangat penting agar daya dukung alam dapat dipertahankan dalam tajuk pembangunan ramah lingkungan.

Secara umum kondisi lingkungan masih tergolong baik, terutama kualitas udara. Namun kualitas air dan tanah menjadi perhatian serius, terutama dengan

konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan gedung, serta pemanfaatan irigasi sebagai drainase. Sementara itu fungsi-fungsi drainase juga tidak berjalan baik, sehingga menimbulkan genangan air disamping luapan air dari luar kota. Permasalahan lingkungan hidup juga terkait kualitas sanitasi. Target pemerintah tahun 2019, kualitas sanitasi sudah 100% baik, dimana kualitas sanitasi sudah memenuhi standar nasional. Persoalan ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup dengan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa persoalan yang perlu diuraikan lebih mendalam antara lain adalah seperti berikut ini:

a. Persampahan

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Prilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh cukup membantu penyelesaian masalah persampahan untuk sementara, namun tidak dalam jangka panjang, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya tampung dan daya dukungnya dari TPA tersebut. Untuk itu pemerintah kota perlu memikirkan TPA regional baru karena pembangunan TPA di dalam Kota Bukittinggi tidak memungkinkan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Disamping itu, program 3 R (reduce, reuse and recycle) belum berjalan efektif, sehingga perlu lebih ditingkatkan dengan cara pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Permasalahan sampah juga erat hubungannya dengan permasalahan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat di Kota Bukittinggi, maka permasalahan limbah pun menjadi sorotan yang perlu mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan limbah ini perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga, yaitu Kabupaten Agam. Dengan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

b. Air bersih

Ketersediaan air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Kondisi eksisting prasarana air minum di Kota Bukittinggi saat ini dilayani oleh PDAM Tirta Jam Gadang. Sumber Air baku PDAM berasal dari Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkaring, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Bor Palolok, Sumur Dangkal Kubang Putih.

Secara umum, distribusi air minum di Kota Bukittinggi menggunakan sistem gravitasi, namun setiap sumber air memiliki cara pendistribusian masing-masing hingga sampai ke daerah pelayanan. Hingga saat ini wilayah pelayanan air minum hampir memenuhi keseluruhan wilayah perencanaan walaupun terdapat beberapa kelurahan yang belum terlayani pelayanan air minum oleh PDAM. Guna mendukung pendistribusian air, saat ini telah dibangun beberapa reservoar dengan total kapasitas sebesar 3.180 m³. Namun karena keterbatasan produksi maka tidak semua reservoar tersebut berfungsi. Permasalahan penting lain juga terkait jaringan perpipaan di Bukittinggi yang sudah tua, sehingga efisiensinya masih rendah, dan tingkat kebocoran cukup tinggi.

Selain mencari sumber air baku baru dari luar kota, Bukittinggi juga sudah harus melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang hingga batas kota. Sementara jaringan dalam kota sudah dilakukan rehabilitasinya semenjak tahun 2011 pada beberapa titik. Dengan demikian peta jaringan menjadi hal penting untuk melihat kondisi perpipaan PDAM di Bukittinggi.

c. Sanitasi Kota

Kondisi sanitasi Kota Bukittinggi belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Penanganan sanitasi perkotaan mestinya sudah mengarah untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang komunal dan terpusat. Permasalahan yang dihadapi oleh Bukittinggi adalah keterbatasan lahan untuk pembangunannya. Sampai saat ini di Bukittinggi belum ada IPAL komunal ataupun IPLT. Persoalan ini tentu akan sangat mengurangi daya dukung lingkungan kota. Pada tahap berikutnya ini akan menjadi persoalan lingkungan, munculnya kawasan kumuh dan persoalan lingkungan lainnya.

Sementara itu penanganan persoalan sanitasi telah menjadi target nasional untuk dituntaskan maksimal di tahun 2019. Dengan demikian penyelesaian masalah drainase di Bukittinggi perlu menjadi prioritas untuk ditangani untuk pencapaian universal access.

d. Genangan Air

Permasalahan genangan air sewaktu hari hujan menjadi sangat krusial dialami Bukittinggi. Permasalahan ini disebabkan oleh kondisi drainase kota yang belum mampu menampung luapan air sewaktu hujan karena endapan sedimen, dimensi dan jaringan yang tidak memadai. Persoalan lain juga diakibatkan oleh volume air hujan akibat luapan dari wilayah luar kota.

Penyelesaian persoalan ini perlu dukungan manajemen drainase terkait dengan penataan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier beserta dukungan dimensinya. Yang paling mendesak dilakukan dalam waktu dekat adalah pengerukan sedimen untuk mendukung kelancaran aliran air. Sementara penyelesaian luapan air pada musim hujan dari luar kota perlu dilakukan pembenahan drainase luar kota dan pengalihan aliran drainase hingga ke drainase primer. Persoalan terkait lainnya yang perlu diseriuskan adalah pengawasan dan edukasi pada masyarakat kota, luar kota dan pengunjung untuk tidak membuang sampah ke dalam drainase.

4.1.2.5. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Kota Bukittinggi sudah lama dikenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ekonomi Kota. Hanya saja pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan permasalahan mengenai belum terwujudnya ketangguhan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan potensi unggulan daerah.

Aktivitas ekonomi Bukittinggi didukung oleh KUKM dan peranannya terlihat dari struktur PDRB Kota Bukittinggi. KUMKM di Bukittinggi terus berkembang dan terbuka, sehingga menjadi magnitude untuk berusaha bagi urban. Implikasinya pengangguran kota terus berkembang sehingga mampu menyerap angkatan kerja. Selain itu KUKM juga dinilai tahan dalam menghadapi goncangan perekonomian, karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan bank dan lebih banyak menggunakan input lokal.

Permasalahan yang dihadapi KUKM di Kota Bukittinggi pada dasarnya sama dengan permasalahan umum yang dihadapi, yakni permasalahan peningkatan kualitas produk, packaging, manajemen usaha pelaku UMKM dan pola pemasaran. Penggunaan teknologi produksi masih terbatas karena spesifik masing-masing

produk dan bahkan pelaku usaha. Pengembangannya membutuhkan intervensi pemerintah, berikut fasilitasi dan motivasi untuk memanfaatkannya.

Permasalahan modal usaha dalam kaitannya dengan kredit perbankan juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Selain itu masalah yang masih mendasar dari KUKM ini adalah manajemen dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan itu semua akhirnya bermuara pada kurang kompetitifnya produk lokal baik skala nasional maupun internasional.

4.1.2.6. Sarana Pendukung Perekonomian

Sarana pendukung pengembangan perekonomian tentunya tidak bisa dilepaskan dari sistem transportasi meliputi jalan raya, alat transportasi terminal dan manajemen lalu lintas. Kota Bukittinggi belum memiliki terminal angkutan barang, sementara kondisi terminal angkutan orang juga semakin berkurang karena peluasan pertokoan. Kondisi ketiadaan terminal angkutan barang dan berkurangnya fungsi terminal angkutan penumpang berdampak kepada aktivitas perekonomian kota. Karena itu keberadaan terminal angkutan barang dan terminal angkutan penumpang yang representatif sangat mendesak. Lahirnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan terminal type A dan B dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi efektif semenjak tahun 2017. Hal ini perlu disikapi dengan baik, sehingga betul-betul mampu mendorong perekonomian kota dengan dukungan sarana dan prasarana yang representatif.

Sejalan dengan persoalan terminal, kebutuhan akan sarana perpustakaan juga sangat mendesak untuk mendukung fungsi kota. Keberadaan gedung parkir yang ada sekarang belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perpustakaan. Operasional gedung parkir yang ada juga belum maksimal, sementara perpustakaan liar yang menggunakan badan jalan juga menjadi persoalan yang masih sulita diatasi, terutama pada puncak keramaian kunjungan ke Bukittinggi. Prasarana penting mendukung perekonomian kota juga terkait dengan pengembangan pasar yang ada. Kebutuhan pasar yang representatif menjadi sangat penting sehingga mampu mendukung pertumbuhan pedagang, meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan ketersediaan areal perpustakaan, baik untuk pedagang ataupun pembeli.

Pada saat ini perkembangan pedagang belum terkendali, sehingga menggunakan badan jalan, areal perpustakaan, sementara pertokoan Banto Trade Centre belum dapat difungsikan. Kondisi ini semakin membuat wajah kota

menjadi semraut dan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi perkotaan. Rencana revitalisasi ketiga pasar menjadi mendesak untuk direalisasikan dengan pembangunan secara vertikal, dan menyediakan areal perparkiran, serta penyediaan pertokoan dan areal perdagangan sesuai kebutuhan dan perilaku pedagang ataupun pembeli.

Mendukung keberadaan Bukittinggi sebagai kota wisata juga dibutuhkan outlet dan shopping centre kerajinan produk UMKM. Hal ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan objek wisata, sehingga perdagangan souvenir dan berbagai produk industri lainnya lebih terkendali dan memberikan kesan nyaman dan aman bagi pengunjung. Begitu juga dengan pusat kuliner yang membutuhkan pengelolaan profesional sehingga memberikan kenangan yang baik bagi setiap pengunjung. Pengembangan kawasan pedestrian di sekitar Jam Gadang juga merupakan salah satu solusi penting yang sudah pernah diwacanakan. Bahkan keberadaan pedestrian saat ini juga perlu ditingkatkan lagi, sehingga tidak memberi image negatif bagi penduduk dan pengunjung. Karena itu konsep pedestrian perlu dilakukan secara terpadu dan perencanaan yang matang, melibatkan seluruh stakeholders sehingga didukung secara bersama. Berbagai keterbatasan yang ada di pusat kota ini juga perlu dicari solusi, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang menjadi penghambat mewujudkan Bukittinggi sebagai pedestrian city.

4.2 Isu Strategis

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Kota Bukittinggi;

2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bukittinggi;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
 - b. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
 - c. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;

Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah

Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Bidang Pemerintahan

Tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance* mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai kualitas SDM aparatur. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan prima yang cepat, tanggap dan murah.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pegawai, sehingga terjadi pengurangan jumlah pegawai dari

sebelumnya. Semenara itu tuntutan pelayanan dan kinerja pegawai semakin meningkat, seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan inovator semakin dituntut perannya. Begitu juga dengan perkembangan regulasi yang menjadi kerangka daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur yang kapabel, inovatif, berkinerja dan profesional. Oleh sebab itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer dengan berbagi aplikasi online yang terus berkembang mutlak dibutuhkan.

Kelembagaan daerah sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 06 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menisyratkan struktur ramping dan kaya fungsi. Jabatan struktural semakin berkurang, sementara jabatan fungsional semakin dikembangkan untuk mendorong tersedianya aparatur yang terampil, inovatif dan produktif. Daerah juga perlu mempersiapkan diri dengan pemetaan potensi aparatur yang ada saat ini dan menempatkannya sesuai potensi, bakat dan minat serta kharakternya. Sementara kelembagaan akan diatur secara nasional melalui peraturan pemerintah yang akan ditetapkan sebagai turunan dari kedua UU tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah secara penuh mulai tahun 2015 dengan penerapan pengelolaan keuangan berbasis accrual juga memaksa daerah untuk menyiapkan seluruh prasarat yang telah dimulai regulasi tingkat daerahnya pada tahun 2014. Karena itu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diterima Kota Bukittinggi secara berturrut-turut terhadap LKPD Tahun 2013, 2014 dan 2015 harus ditingkatkan kualitasnya, apalagi pada tahun 2015 LKPD yang diaudit sudah berbasis accrual. Permasalahan aset adalah fokus yang terus diseriuskan, sehingga tidak menjadi ganjalan dalam menyusun neraca pada sistem akuntansi pemerintah.

b. Bidang Pendidikan

Upaya pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari 3 (tiga) Pilar pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, dan akuntabilitas.

Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah peningkatan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang masih menjadi kewenangan kota, dengan penuntasan pencapaian target

Standar Nasional Pendidikan terhadap 8 standar. Sementara pendidikan tingkat SLTA yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga menjadi isu tersendiri terkait kualitas yang telah dicapai selama ini dan menjadi daya tarik mendapatkan layanan pendidikan di Bukittinggi.

Isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan pemenuhan target SNP secara merata pada seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Sementara untuk menjamin kualitas dan mutu pendidikan tingkat SLTA selama ini perlu disikapi model pengembangan pendidikan tingkat provinsi yang akan diarahkan dengan pendidikan pola boarding school, sementara Bukittinggi memiliki keterbatasan lahan untuk membangun unit sekolah baru, dan lahan sekolah yang ada sekarang juga akan terbatas pengembangannya.

Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan pengelolaan sekolah serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Untuk aspek tata kelola dan akuntabilitas, difokuskan pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan pendidikan melalui pemenuhan target SNP merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan.

Kualitas pendidikan di Bukittinggi selama ini juga sejalan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi yang hingga tahun 2013 selalu yang tertinggi di Sumatera Barat bahkan termasuk 10 besar nasional. Namun semenjak tahun 2014, pemerintah melalui BPS melakukan perubahan formulasi penghitungan IPM, sehingga Bukittinggi berada di posisi kedua setelah Kota Padang. Ini merupakan isu strategis yang perlu disikapi, dimana variable yang selama ini terkait dengan pendidikan berupa usia harapan sekolah cenderung lebih menguntungkan kota-kota besar dan ibukota provinsi, yang lebih banyak memiliki perguruan tinggi.

Tantangan pendidikan juga semakin sulit seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dengan pemberlakuan pasar bebas ASEAN yang menghadapkan SDM antar negara ASEAN dalam persaingan terbuka. Disamping tuntutan kualitas kinerja dan profesionalitasnya, karakter juga menjadi tantangan yang perlu diseriuskan, akibat dampak negatif budaya

asing. Kecenderungan yang ditunjukkan dalam praktek kehidupan masyarakat, dampak negatif lebih berpengaruh ketimbang dampak positifnya. Dampak negatif tersebut berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan, diantaranya penerapan nilai-nilai agama dan adat yang cenderung menurun dan terdegradasi akibat pengaruh asing. Disamping itu upaya preventif dengan memperkuat budaya Minangkabau dengan filosofi Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah belum maksimal dilakukan, baik melalui dunia pendidikan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan karakter berbasis aqidah yang telah diprogramkan semenjak awal RPJPD Kota Bukittinggi juga masih perlu ditingkatkan dan diperjelas konsep penerapannya. Begitu juga dengan penguatan kecerdasan secara berimbang antara kekuatan intelegensi, emosional dan spiritual yang sudah mulai diterapkan.

c. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Isu utama bidang kesehatan sekarang ini adalah meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dari keberadaan sarana pelayanan kesehatan maupun dari aspek biaya. Kemudian peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan adalah hal mutlak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekarang ini.

Posisi Bukittinggi yang berada di persimpangan dan menjadi kota tujuan sangat rentan terhadap penyakit menular dan peredaran Narkoba yang secara bersamaan berakibat pada peningkatan penderita HIV/AIDS. Pendekatan penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini lebih berorientasi medis perlu diperkuat dengan pendekatan agama, adat dan budaya. Pendekatan medis semata ternyata mengakibatkan permasalahan baru yang semakin memperparah persoalan kesehatan sebagai akibat perluasan dan turunannya.

Isu kesehatan juga terkait erat dengan lingkungan hidup, dan target nasional yang telah diluncurkan pemerintah, yaitu 100% pemenuhan air bersih, 0 kawasan kumuh dan 100% sanitasi yang layak. Pemenuhan air bersih yang menjadi isu adalah tingginya tingkat kebocoran perpipaan karena sudah berusia tua, terutama transmisi induk dari sumber air baku di Sungai Tanang. Terbatasnya sumber air baku juga menjadi isu penting, sementara kebutuhan air bersih terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kunjungan ke Bukittinggi.

Kawasan kumuh Bukittinggi saat ini tercatat seluas 1 (satu) hektar yang terdapat di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai. Tahun 2019 kawasan ini diharapkan sudah dituntaskan dan juga diantisipasi munculnya kawasan baru. Penanganan masalah ini harus berangkat dari persoalannya karena keterbatasan daya dukung lahan, peningkatan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat yang belum mendukung.

Peningkatan sanitasi yang menjadi isu penting adalah masalah persampahan dan limbah. Penanganan persampahan harus dimulai dari sumbernya dan masyarakat yang berorientasi pada 3 R. Pembuangan sampah yang selama ini dilakukan ke TPA Regional Payakumbuh akan memiliki batas dan jangka waktu, karena pengelolaan di TPA tersebut juga belum dilaksanakan. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibangun di 2 (dua) lokasi, yaitu Kelurahan Aua Kuniang dan Kelurahan Campago Ipuah belum dioperasikan sebagaimana mestinya, sehingga belum berdampak terhadap pengelolaan persampahan. Sementara air limbah di Bukittinggi belum terkelola karena belum ada IPLT dan IPAL, baik yang terpusat maupun komunal. IPAL Belakang Balok juga belum dapat dioperasikan karena belum dapat dituntaskan infrastruktur pendukungnya berupa perpipaan induk yang penempatannya perlu dikaji mendalam pada jalan yang ada. Setelah itu baru dapat dilakukan penyambungan rumah yang membutuhkan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Hal penting lainnya juga berupa kelembagaan dan operasionalisasinya karena berbasis masyarakat, sehingga juga harus didukung oleh regulasi.

d. Bidang Ekonomi

Terbukanya pintu perdagangan bebas dunia menyebabkan lancarnya keluar masuk produk antar negara. Pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya pada produk industri barang, tetapi juga jasa, tenaga kerja dan modal. Setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk memasarkan produknya ke sesama negara ASEAN. Apabila kondisi ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka produk asing akan membajiri pasar dalam negeri. Sebaliknya produk kita akan masuk ke berbagai negara ASEAN, siap untuk bersaing baik dari sisi kualitas maupun harga, karena tidak dikenakan lagi tarif bea masuk antar negara. Dampaknya, industri akan bertumbuh, termasuk UMKM, terbukanya lapangan kerja, dan akhirnya meningkatkan kemampuan dan daya beli masyarakat sebagai wujud kesejahteraan.

Terkait ini, isu strategis yang dihadapi UMKM kita untuk merebut peluang pasar terkait dengan standarisasi produk. Sebagian besar produk UMKM kita

belum dilakukan standardisasi nasional ataupun internasional. Dengan demikian berbagai produk yang dihasilkan belum semuanya dapat dikatakan memenuhi standar. Walaupun pemerintah kota Bukittinggi telah memulai memfasilitasi beberapa produk untuk memperoleh sertifikat halal, namun belum diikuti produk lainnya, karena pembiayaan yang masih dianggap relatif mahal. Begitu juga perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari berbagai produk asli daerah sehingga tidak diklaim sebagai produk asing.

Dari sisi tenaga kerja, sebagian besar SDM kita belum menguasai bahasa asing, apalagi bahasa negara-negara ASEAN. Kondisi ini belum mendukung tenaga kerja kita masuk ke pasar asing, disamping penguasaan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan. Begitu pula dengan lembaga pendidikan kita yang belum sepenuhnya berorientasi kesana.

Sebelum berorientasi luar negeri, sebenarnya kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar. Namun ada kecendrungan pasar lokal kita mulai dirambah berbagai produk asing, khususnya China, sehingga hampir seluruh produk yang beredar di pasar dalam negeri adalah *made in China*. Realita ini sudah berlangsung jauh sebelum berlakunya MEA. Pemberlakuan MEA secara efektif tahun 2016, tentu akan meningkatkan masuknya produk China sehingga semakin membanjiri pasar dalam negeri yang mungkin saja masuk melalui salah satu negara ASEAN. Karena itu meningkatkan daya saing produk industri lokal menjadi prioritas untuk dituntaskan.

Terkait peningkatan penguasaan pasar lokal dan dalam negeri, maka ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor pendukung industri. Beberapa isu strategis terkait ini antara lain belum efektifnya kelembagaan yang mampu mengayomi pelaku industri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya dari sisi teknologi produksi, pasca produksi, permodalan dan pemasaran. Pembentukan kelompok dan kluster relatif sulit karena lokasi yang menyebar sehingga pelaku usaha cenderung bergerak sendiri dan terkesan bersaing dengan pelaku lainnya yang memiliki produk sama. Pemasaran produk juga belum didukung ketersediaan outlet dan shopping centre yang dikelola secara profesional, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Berbagai praktek individual para pelaku menyebabkan produk lokal tidak bersaing, sehingga produk dalam negeri dari luar kota juga membanjiri pasar kota. Kondisi ini juga menimbulkan image negatif akibat kemacetan dalam kota, pasar yang belum representatif, permasalahan terminal, kesulitan parkir dan perilaku pedagang.

Kepariwisataan Bukittinggi juga relatif masih terkonsentrasi di sekitar Jam Gadang. Hal ini menyebabkan tingkat kemacetan di wilayah tersebut, sementara dukungan perparkiran belum memadai. Pengembangan objek wisata di luar konsentrasi Jam Gadang merupakan solusi yang perlu

disegerakan. Kebijakan ini akan membantu mengurangi kemacetan, dan menggeliatkan ekonomi di wilayah pengembangan.

Keberhasilan pembangunan salah satunya juga diukur melalui tingkat kemiskinan. Pengentasan kemiskinan masih menjadi isu strategis, dimana capaian terhadap target kemiskinan sesuai RPJPD yang sudah dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 belum tercapai. Dari 3% yang ditargetkan, pada tahun 2015 berdasarkan data eksisting tahun 2014, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi baru mencapai 4,56%. Dengan demikian, isu kemiskinan masih perlu dimunculkan melalui intervensi program yang lebih tepat sesuai profil kemiskinan kota.

e. Pencapaian Sasaran Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015

Penelaahan tujuan pembangunan Millenium Goals (MDGs) juga merupakan salah satu instrument guna melihat sasaran-sasaran penting yang harus dicapai dan ditunjang oleh pemerintah daerah. Sasaran-sasaran yang tertuang dalam MDGs perlu diidentifikasi untuk melihat kemungkinan peluang, tantangan ataupun ancaman yang akan dihadapi Pemerintah Daerah dalam waktu lima tahun ke depan. Berikut telaahan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Millenium Goals (MDGs).

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu:

MDG 1 : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

MDG 2 : Mencapai pendidikan dasar untuk semua

MDG 3 : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

MDG 4 : Menurunkan angka kematian anak

MDG 5 : Meningkatkan kesehatan ibu

MDG 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

MDG 7 : Memastikan kelsetarian lingkungan hidup

MDG 8 : Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Sampai dengan tahun 2015 ini, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) sasaran yang telah dicapai; (2) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun

2015 (on-track); dan (3) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.

Sasaran pembangunan MDGs secara nasional yang ditargetkan untuk direalisasi hingga akhir tahun 2015 oleh Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut

1. **MDG 1** - Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari relatif sudah semakin kecil, hal ini terlihat dari rata-rata PDRB perkapita Kota Bukittinggi data eksisting tahun 2014 sudah mencapai Rp. 46,83 juta atau setara dengan pendapatan US\$ 9 perhari. Sementara indeks gini juga relatif kecil, sehingga tidak terlalu jauh ketimpangan pendapatan antar penduduk. Namun hal ini perlu diimbangi dengan tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sehingga akan menekan kemampuan dan daya beli masyarakat.
2. **MDG 3** - Kesetaraan Gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan telah hampir tercapai yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di seluruh jenjang pendidikan yang sudah hampir sama, bahkan perempuan lebih tinggi, sehingga angka melek huruf Bukittinggi juga masih tetap yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat mencapai 99,89%, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 99,86%, sementara penduduk perempuan 99,89%.
3. **MDG 6** - Prevelensi tuberculosis mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2010, sehingga data tahun 2014 sehingga angka morbiditas secara umum sudah rendah.

Sasaran dari tujuan pembangunan MDGs secara nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan dan untuk Kota Bukittinggi juga akan tercapai sampai akhir tahun 2015 (on track) berupa :

1. **MDG 1** - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang dengan penemuan kasus yang sangat sedikit;
2. **MDG 2** - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar sudah melebihi 100;
3. **MDG 3** - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi sudah hampir sama, bahkan untuk beberapa jenjang pendidikan, perempuan lebih unggul;
4. **MDG 4** - Angka kematian balita telah menurun dari 5 per 1.000 kelahiran pada tahun 2010 hingga pernah mencapai 0 pada tahun 2013, dan berfluktuasi hingga 1 sampai maksimal 2 kasus pertahun hingga tahun 2014 eksisting. Kondisi ini telah jauh melebihi target nasional tahun 2015 yang menargetkan 44 kasus;

5. **MDG 5** - Angka kematian ibu menurun dari 4 kasus pada tahun 2010 menjadi hingga 0 kasus dan berfluktuasi dari 1 sampai 2 kasus. Secara menyeluruh ini sudah melebihi target nasional tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup;
6. **MDG 6** - Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya diantara kelompok resiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Peningkatan jumlah ini juga sebagai dampak pengungkapan kasus yang sebelumnya cenderung tertutup dan pendekatan yang masih berorientasi medis;
7. **MDG 7** - Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26% selama 20 tahun kedepan. Bagi Bukittinggi upaya ini dilakukan dengan meningkatkan penanaman pohon, pemeriksaan keayakan gas buangan kendaraan bermotor dan mesin industri serta peralatan lainnya. Walaupun kualitas udara ambien Bukittinggi masih yang terbaik, namun upaya perlindungan dan peningkatannya masih terus dibutuhkan.

4.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang dikenal dengan Trisakti dan Nawacita.

A. Nawacita

Nawacita merupakan 9 agenda Prioritas Pembangunan nasional, yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
6. Akan Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
7. Akan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik;

8. Akan Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Akan Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial.

B. Trisakti

Trisakti merupakan 3 (tiga) target nasional yang terdiri dari program aksi sebagai berikut:

1. Berdaulat Dalam Bidang Politik

Pencapaian target ini terdiri dari 12 program aksi dan 115 prioritas utama, sebagai berikut:

- a. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global, terdiri dari 4 prioritas utama;
- b. Memperkuat sistem pertahanan negara, terdiri dari 4 prioritas utama;
- c. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat, terdiri dari 8 prioritas utama;
- d. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara, terdiri dari 7 prioritas utama;
- e. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik, terdiri dari 7 prioritas utama;
- f. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi, terdiri dari 6 prioritas utama;
- g. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah, terdiri dari 11 prioritas utama;
- h. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa, terdiri dari 8 prioritas utama;
- i. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, terdiri dari 6 prioritas utama;
- j. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan, terdiri dari 7 prioritas utama;
- k. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan, terdiri dari 42 prioritas utama;
- l. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, terdiri dari 5 prioritas utama.

2. Berdaulat Dalam Bidang Ekonomi

Pencapaian target ini dicapai melalui 16 program aksi sebagai berikut:

- a. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM;
- b. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan;
- c. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional;

- d. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah dan membangun regulasi mewajibkan CSR dan/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan;
 - e. Membangun pemberdayaan buruh;
 - f. Membangun sektor keuangan berbasis nasional;
 - g. Penguatan investasi domestik;
 - h. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara;
 - i. Membangun infrastruktur;
 - j. Membangun ekonomi maritim;
 - k. Penguatan sektor kehutanan;
 - l. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan;
 - m. Membangun perimbangan pembangunan kawasan;
 - n. Membangun karakter dan potensi wisata;
 - o. Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional;
 - p. Pengembangan industri manufaktur.
3. Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan
- Pencapaian target ini dicapai melalui 3 (tiga) program aksi sebagai berikut:
- a. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa;
 - b. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial;
 - c. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

C. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran makro pembangunan yang akan dicapai secara nasional adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Target Makro RPJMN 2014 – 2019

Indikator	2014* (Baseline)	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	76,3
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat ¹	0,55	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,36
▪ Meningkatnya presentase penduduk yang	51,8%	Min. 95%

menjadi peserta jaminan kesehatan melalui ▪ SJSN Bidang Kesehatan	(Oktober 2014)	
▪ Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan		
Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
Pekerja informal	1,3 juta	3,5 juta
Ekonomi Makro		
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	72.217
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	41.163	
▪ Inflasi	8,4%	3,5%
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%

4.2.3. Sustainable Development Goals (SDG'S)

Dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG'S) terdapat 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 yaitu:

1. Pemberantasan kemiskinan
2. Nol kelaparan
3. Kesehatan yang baik
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesenjangan gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Kota dan masyarakat berkelanjutan
12. Konsumsi yang bertanggung jawab
13. Aksi perubahan iklim
14. Perubahan bawah laut
15. Kehidupan darat
16. Perdamaian dan keadilan
17. Kemitraan demi mencapai tujuan

4.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 telah merumuskan Visi “Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya

dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan”, dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan; serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dimuat Arah pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas
- b. Mewujudkan pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah
- c. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
- d. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
- e. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu bersaing
- f. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata
- g. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
- h. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- i. Penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah
- j. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan kota

Beberapa target pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi 2006 – 2025 pada periode RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah seperti berikut:

Tabel 4.3
Target Kinerja RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Capaian 2014 (baseline)	Target 2020
1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga Konstan (%)	6,19	7,65
2.	PDRB Harga Konstan (Rp. Milyar)	4.592	2.134
3.	Tingkat Inflasi (%)	9,24	5,00

No	Indikator	Capaian 2014 (baseline)	Target 2020
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,82	1,23
5.	Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta/ \$)	46,83 \$3.131	68,0 \$6.800
6.	Angka Kematian Bayi (000 kelahiran)	4	12
7.	Angka Kurang Gizi (%)	0	6
8.	Peringkat HDI/ IPM Nasional	11	7
9.	APM usia 19 – 24	100	50
10.	Kualitas Pendidikan (berbasis aqidah)	Belum ada data	7 nasional
11.	Pendidikan Internasional (jenjang SLTA)	Belum ada	Akreditasi
12.	Rumah Sakit Traumatic Centre	Belum ada	Belum ada
13.	Pengangguran (%)	3,93	8
14.	Kemiskinan (%)	4,56	2,5

4.2.5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030, dirumuskan beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi, yaitu :

- Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan;
- Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional;
- Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat;

- f. Pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional; dan
- g. Peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

4.2.6. Kebijakan Pembangunan Daerah tetangga

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, maka perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD. Adapun penyelarasan pembangunan antar daerah di Kota Bukittinggi hanya dengan RPJMD Kabupaten Agam. Karena Kota Bukittinggi dikelilingi hanya oleh Kabupaten Agam.

Tabel 4.4
Hubungan Pembangunan Kota Bukittinggi dengan Daerah Tetangga

NO	KABUPATEN AGAM	KETERKAITAN
1	Kabupaten Agam yang memiliki peluang kerja yang jauh sedikit dari Kota Bukittinggi, sehingga akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dengan daerah tujuan terdekat adalah Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi dapat menjadi tujuan bagi para pencari kerja dan penduduk miskin yang bekerja tanpa keahlian
2	Kabupaten Agam sedang membenahi objek objek Wisata	Kota Bukittinggi akan menerima manfaat dari pembangunan objek wisata di Kabupaten Agam , terutama dibidang jasa hotel dan perdagangan dan jasa
3	Minimnya fasilitas kesehatan dan jauhnya jangkauan masyarakat ke Rumah Sakit di Kabupaten Agam di Lubukbasung, mengakibatkan penduduk memilih alternatif memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi akan menjadi sasaran utama bagi masyarakat di wilayah Agam dalam peningkatan kualitas kesehatan, meskipun Kota Bukittinggi belum mempunyai RSUD, namun Kota Bukittinggi mempunyai beberapa Rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Propinsi, dan swasta

4	Masih rendahnya IPM Kabupaten Agam dibanding Kota Bukittinggi	IPM Kota Bukittinggi jauh lebih tinggi dari Kabupaten Agam menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi sasaran pendidikan bagi penduduk di wilayah sekitar Bukittinggi.
5	Kabupaten Agam belum mempunyai pusat perdagangan yang merupakan tujuan propinsi tetangga.	Kota Bukittinggi mempunyai Pusat grosir dan eceran yang merupakan pusat grosir di wilayah Sumatera Tengah, yang identik dengan Pusat Grosir Tanah Abang, menguntungkan Kota Bukittinggi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, karena propinsi tetangga memanfaatkan pusat gosir tersebut dalam perdagangan khususnya konveksi
6	Kabupaten Agam memiliki sumber air baku yang sangat dibutuhkan oleh Kota Bukittinggi untuk kebutuhan air bersih	Kota Bukittinggi membutuhkan kerjasama lanjutan dengan Kabupaten Agam dalam mencari sumber air baku yang baru untuk disalurkan di Daerah Kota Bukittinggi.

4.2.7. Kerjasama Antar Daerah

Bukittinggi memiliki magnitude yang kuat untuk menarik pengunjung untuk berusaha, mendapatkan layanan ataupun berkunjung. Konsekwensinya Bukittinggi harus dapat memenuhi kebutuhan setiap pengunjung dengan baik untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi Bukittinggi sebagai kota kunjungan. Pada sisi yang lain, Bukittinggi memiliki keterbatasan karena keterbatasan lahan dan sumberdaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota.

Bukittinggi mengandalkan sumber air yang berasal dari Kabupaten Agam untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pengelolaan sampah Bukittinggi juga sangat tergantung TPA Regional payakumbuh untuk menghadirkan TPA minimal Sanitary landfill. Begitu juga untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh Bukittinggi secara mandiri. Karena itu kerja sama antar daerah adalah salah satu peluang yang dapat diambil dan dikembangkan. Melalui kerjasama antar daerah beberapa persoalan kota juga akan dapat diselesaikan.

4.3. Penetapan Isu Strategis

Setelah melihat pengelompokan isu dan permasalahan di tingkat kota Bukittinggi maka didapatkan beberapa isu strategis yang harus segera di tanggap. Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis pada dasarnya menyangkut dengan kondisi dan aspek yang sangat penting dan

strategis serta menentukan arah pembangunan Kota Bukittinggi 5 (lima) tahun kedepan. Karena isu-isu tersebut merupakan kondisi yang mendasar dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan, oleh karena itu penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir masalah pokok pembangunan dan isu-isu strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dimaksud harus segera ditanggapi dan ditindak lanjuti. Penetapan isu tersebut harus memperhatikan beberapa kriteria yakni (1) Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, propvinsi dan daerah Kota Bukittinggi ; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh Walikota terpilih.

Berdasarkan uraian diatas, maka Isu-isu yang bersifat strategis Kota Bukittinggi dikelompokkan antara lain:

1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan
3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi
4. Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan MEA
6. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
7. Pembangunan Kependudukan
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Penggulangan kemiskinan

Berikut analisis terkait rumusan isu strategis dimaksud.

4.3.1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat;

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang.

Sebab, meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat.

Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negative yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

4.3.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan

keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu :

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
- e. Perlunya semua *stakeholder* untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan

kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.

4.3.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang murah dan representatif.

Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata. .

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep smart city. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

4.3.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (*Brundtland Report* dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH

sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep green city juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

4.3.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daeraantara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

4.3.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah .

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya

pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

4.3.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa , terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75% . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 s/d ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat komplek. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang

terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik .

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan Kuantitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan data Base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau eksekusi dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat hinterland atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km². Dan untuk Kecamatan Guguk panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

4.3.8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan , pelaksanaan ,monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah

perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.227 orang atau 60,40% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 3.683 orang pegawai. Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang – Undang , mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

4.3.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Percepatan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015 , terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai

kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi. Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

Disamping isu strategis diatas, maka tak kalah pentingnya yang harus menjadi pekerjaan yang berat adalah Pengalihan Kewenangan Urusan Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkuren). Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan :

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
- g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Tabel 4.5

Sandingan Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Bukittinggi

NO	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT	ISU STRATEGIS KOTA BUKITTINGGI
1		Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.	Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Pembangunan Birokrasi & Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
3		Peningkatan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi
4		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
5	Penataan Sistem Ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing	Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah	Pelaksanaan MEA
6		Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
7	Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB		Pembangunan Kependudukan
8			Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Terutama Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah	Penanggulangan Kemiskinan

